

**KESESUAIAN *DATABASE* BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC.  
DARUSSALAM DENGAN REALISASI PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI  
UNTUK PETANI PRA SEJAHTERA MENURUT *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**FIRMAN MUMTAZA**

**NIM. 210102096**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1446 H**

**KESESUAIAN *DATABASE* BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC.  
DARUSSALAM DENGAN REALISASI PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI  
UNTUK PETANI PRA SEJAHTERA MENURUT *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

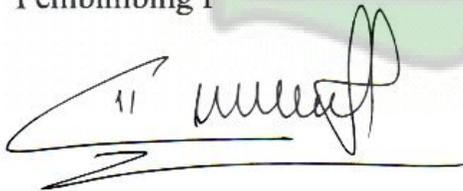
**FIRMAN MUMTAZA**

**NIM. 210102096**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19751102007012027

Pembimbing II



**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIP. 1991022023212035

**KESESUAIAN DATABASE BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KEC.  
DARUSSALAM DENGAN REALISASI PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI  
UNTUK PETANI PRA SEJAHTERA MENURUT *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**

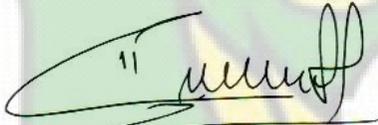
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Maret 2025 M  
20 Ramadhan 1446 H

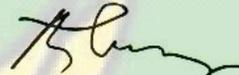
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.  
NIP. 19751102007012027



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIP. 1991022023212035

Penguji I

Penguji II



Dr. Jur. Chairul Fahmi, MA  
NIP. 198106012009121007



Boihaqi bin Adnan, Lc., MA  
NIP. 198604152020121007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamarruzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Firman Mumtaza

NIM : 210102096

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,



Firman Mumtaza

NIM. 210102005

## ABSTRAK

Nama : Firman Mumtaza  
NIM : 210102096  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul skripsi : Kesesuaian *Database* Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Darussalam Dengan Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi Untuk Petani pra sejahtera Menurut *Tas'ir Al-Jabari*  
Tanggal Munaqasyah : 20 Maret 2025  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
Kata Kunci : Realisasi, Pembagian Pupuk Subsidi, Petani, *Tas'ir Al-Jabari*

Distribusi pupuk subsidi merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan. Di Kecamatan Darussalam, pengelolaan data petani dan distribusi pupuk subsidi dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana ketentuan pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera? 2) Bagaimana realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera? 3) Bagaimana tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* terhadap realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembagian pupuk subsidi oleh BPP Kecamatan Darussalam bagi petani pra sejahtera, realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam dan menganalisis tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* terhadap realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis normatif dengan menggunakan data kualitatif secara deskriptif analisis melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses pendataan dan distribusi pupuk subsidi sudah terstruktur melalui sistem e-RDCK, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data penerima, keterbatasan alokasi pupuk, dan penyimpangan harga yang merugikan petani. Dalam perspektif *Tas'ir al-Jabari*, intervensi harga subsidi memberikan manfaat bagi petani dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, namun pelaksanaan distribusi yang tidak merata dan ketidaksesuaian data penerima menunjukkan adanya kekurangan dalam efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang diajukan adalah untuk mempercepat serta meningkatkan akurasi dalam proses verifikasi dan pembaruan data, memastikan pengecer mematuhi harga subsidi yang ditetapkan, serta mendorong petani untuk lebih aktif dalam memperbarui data mereka di sistem e-RDCK agar distribusi pupuk subsidi dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip *Tas'ir al-Jabari*.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kesesuaian Database Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Darussalam Dengan Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi Untuk Petani pra sejahtera Menurut Tas’ir Al-Jabari*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag. selaku Wadek III.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun

proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Serta kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

5. Teristimewa kepada Ayah Tercinta Ayahanda tercinta Jailani dan Ibunda tercinta Yusniar serta Kakak Naja Fitria dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan Kasih sayang, nasihat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.
6. Teristimewa Kepada teman dan sahabat seperjuangan terutama yang menemani Skripsi saya Muhammad Dhiaul Haq, Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah, Muhammad Thariq Aqil Azizi, Rizqi Safiratun Nabil, Zurra Wahyuni, Farisa Ajasra, Ikram, Iput, Mimi, Dara, Ned, Ummi dan Serta kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulis saat bimbingan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Firman Mumtaza karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

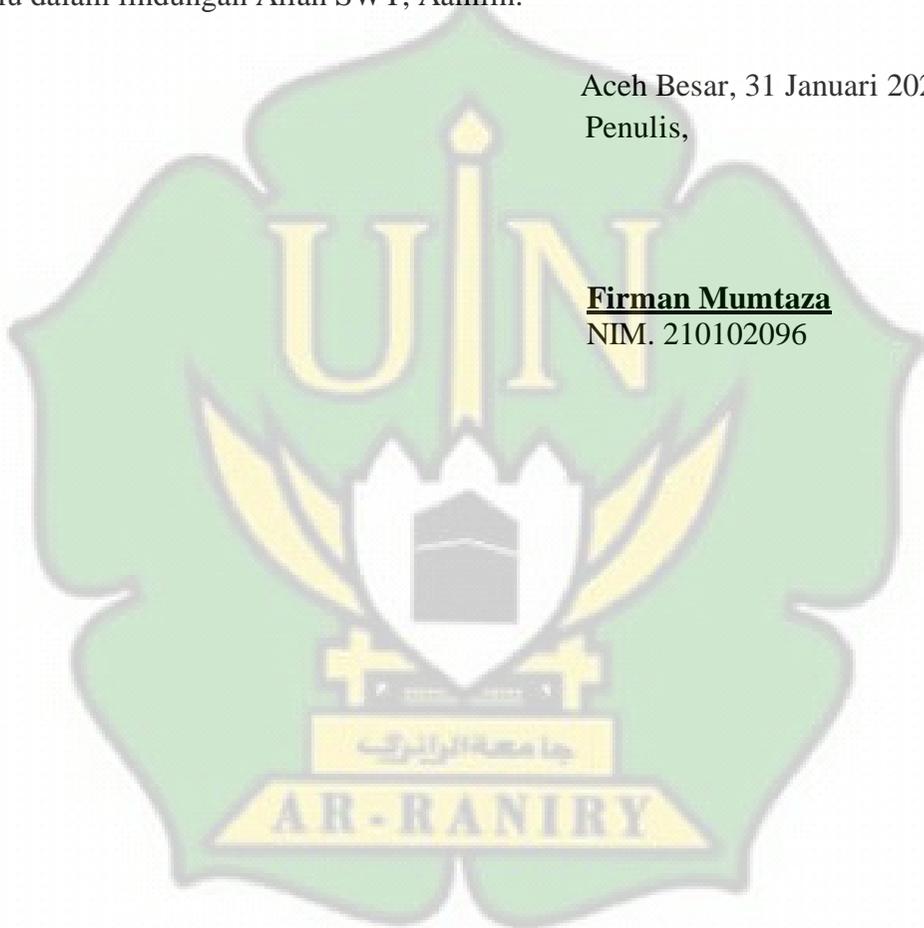
Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Aceh Besar, 31 Januari 2025

Penulis,

**Firman Mumtaza**

NIM. 210102096



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* ( ة ) hidup

*Ta marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* ( ة ) mati

*Ta marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةِ

ُ

الْمُنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ

طَلْحَةَ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

: *Talḥah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الْجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

الْأَوْء - *an-nau'*

شَيْء - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
 - *Fa auful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
 - *Ibrāhīmul-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hījju al-baiti man istaṭā‘a*  
 الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ *ilaihi sabīla.*  
 سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hījjul baiti manistaṭā‘a ilaihi*  
*sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
 - *Fa auful-kaila wal-mīzān*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*  
 لِلدِّيِّ بَيْكَةً مَبَارَكًا *bibakkata mubārakan*
- شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ - *Syahru Ramad‘ān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ ānu*  
 فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad‘ānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
- *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Darussalam ..... 39



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
<b>Lampiran 2</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	62
<b>Lampiran 3</b> Protokol Wawancara .....	63
<b>Lampiran 4</b> Dokumentasi .....	66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB DUA    <b>KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DAN KETENTUAN ALOKASI PUPUK SUBSIDI MENURUT HUKUM POSITIF .....</b></b>	<b>24</b>
A. Konsep <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dalam Mekanisme Pasar .....	24
1. Pengertian <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dan Dasar Hukumnya .	24
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i> .....	25
3. Urgensi dan Manfaat <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dalam Mekanisme Pasar .....	30
B. Ketentuan Alokasi Pupuk Subsidi dan Pembagiannya untuk Petani Menurut Hukum Positif.....	31
1. Ketentuan Pembagian Pupuk Subsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020	31
2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi .....	33

	3. Upaya Pemerintah dalam Pembagian Pupuk Subsidi Bagi Petani pra sejahtera .....	35
<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS KESESUAIAN DATABASE BPP KECAMATAN DARUSSALAM DENGAN REALISASI PEMBAGIAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI PRA SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF <i>TAS'IR AL- JABARI</i>.....</b>	<b>38</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
	B. Deskripsi Database Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam dan Proses Pembagian Pupuk Subsidi.....	39
	C. Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi bagi Petani pra sejahtera oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam.....	43
	D. Analisis Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi Dalam Perspektif <i>Tas'ir al-Jabari</i> .....	47
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
	A. Kesimpulan .....	54
	B. Saran.....	55
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Tas'ir al-jabari*<sup>1</sup> secara konseptual dipahami sebagai konsep penetapan harga oleh pemerintah dan menjadi bagian dari otoritasnya untuk memastikan keterjangkauan konsumen terhadap kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan pokok baik produk barang ataupun jasa. Di Indonesia, salah satu komoditas yang diproteksi pemerintah melalui regulasi khusus adalah pupuk subsidi yang dipasarkan secara terbatas untuk kalangan tertentu dengan pola pupuk subsidi, dengan berbagai varian yang biasanya disalurkan khusus untuk petani yang berhak mendapatkan subsidi untuk pembelian pupuk yang berbeda dengan mekanisme normal harga pupuk.

Pupuk subsidi secara regulasi telah ditetapkan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri pertanian untuk memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani dan juga varian dari pupuk. Selanjutnya regulasi juga mengatur tentang harga, ketentuan dan kriteria petani yang berhak mendapat pupuk subsidi, mekanisme penyaluran dan distribusinya serta mengawasi mekanisme pasar melalui proteksi harga dengan menggunakan ketentuan hukum khusus.<sup>2</sup>

Pemerintah menetapkan pupuk subsidi dengan ketentuan harga cenderung lebih murah dibandingkan dengan pupuk non subsidi agar petani pra sejahtera dapat lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga ekonomis demi menunjang kinerja dan memaksimalkan hasil panennya.

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam*, terjemahan (Bandung: Diponegoro, 1967), hlm. 199.

<sup>2</sup> Valeriana Darwis dan Supriyati, "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.11, No.1, 2004, hlm. 45-60.

Dalam proses penyaluran pupuk subsidi ini, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan komoditas utama dan luas lahan yang dimiliki oleh petani di wilayah tertentu baik pada level provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Alokasi ini bertujuan untuk memastikan jumlah petani yang akan diberdayakan dengan pupuk subsidi, sehingga dengan penetapan tersebut maka petani berhak memperoleh berbagai jenis pupuk dengan harga yang terjangkau. Dengan menggunakan mekanisme pupuk subsidi maka target pemerintah untuk mendistribusikan pupuk subsidi sesuai yang telah ditetapkan dalam regulasi pupuk subsidi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan petani, terutama di kalangan petani pra sejahtera, yang sangat mengandalkan pendapatan kebutuhannya dari hasil pertanian.<sup>3</sup>

Untuk memastikan pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran, maka pemerintah menetapkan petunjuk teknis sehingga target untuk meningkatkan kualitas hidup petani pra sejahtera akan tercapai dengan baik. Dalam konsep fiqh muamalah ketepatan pada penetapan sasaran dan realisasi harga sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya distorsi pada mekanisme pasar. Menurut Ibnu Qayyim, pemerintah penting memperhatikan mekanisme pasar bahkan dapat melakukan intervensi pada skala tertentu untuk mencegah ketimpangan harga pasar dan memastikan terealisasi keadilan harga pasar terutama terhadap kalangan tertentu dari kalangan masyarakat pra sejahtera.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar masih diperdebatkan oleh ulama dan cendekiawan muslim terutama tentang legalitas dan faktor-faktor yang digunakan sebagai alasan untuk penetapan harga yang dilakukan pemerintah yang cenderung sebagai intervensi terhadap mekanisme pasar. Alasan yang umumnya digunakan sebagai prinsip-prinsip penerapan *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar adalah ketidaksesuaian harga aktual yang terdapat dalam

---

<sup>3</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140-141.

realitas pasar dengan tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat sebagai konsumen.<sup>5</sup>

Di sisi lain bila *tas'ir al-jabari* tetap diterapkan, maka pedagang akan mengalami kerugian akibat kebijakan harga yang diberlakukan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus bijak dalam menetapkan *tas'ir al-jabari* ini agar pedagang tidak dapat dirugikan dari penetapan harga yang semena-mena oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan pedagang atau bahkan dapat menyebabkan kerugian jika harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak memperhatikan dari segi biaya produksi atau pembelian. Oleh karena itu, pemerintah sebelum melakukan *tas'ir al-jabari* juga harus memperhatikan dari segala segi, pemerintah diharapkan untuk tidak menetapkan harga secara suka-suka.<sup>6</sup>

Kedua, *tas'ir al-jabari* adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol fluktuasi harga, yang sering kali ditetapkan secara arbitrer oleh pedagang, sehingga dapat membebani konsumen. Oleh karena itu, kontroversi seputar hukum *tas'ir* timbul dari konflik antara norma hukum dan dinamika pasar, serta dari intervensi pemerintah dalam menetapkan harga yang dianggap adil bagi semua pihak.<sup>7</sup>

Mayoritas cendekiawan dari mazhab-mazhab utama Islam seperti Hanafi, al-Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwasanya pemerintah tidak seharusnya mengintervensi harga pasar atau melakukan *tas'ir*.<sup>8</sup> Para ulama mazhab berargumen bahwa ada sejumlah alasan substantif yang mendukung pandangan ini, salah satunya adalah prinsip larangan mengambil harta orang lain tanpa keadilan. Para ulama yang menentang *tas'ir* berpendapat bahwa tindakan pemerintah dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), hlm. 532.

<sup>6</sup> Asnawati Patuti, dkk. "Kedudukan *al-Tas'ir al-Jabari* dalam Tinjauan Kaidah *Yuthammal al-Dharar al-Khash li Daf' al-Dharar al-'Am*", *Jurnal Al-Khiyar*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 115.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ash al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 385.

menetapkan harga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang merampas hak milik pedagang secara tidak adil. Intervensi semacam ini, menurut para ahli dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan potensi kerugian finansial.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, mazhab Maliki memandang *tas'ir* sebagai praktik yang dapat diterima. Menurut pandangan ini, otoritas pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga dalam rangka mengatur pasar dan mencegah beban yang berlebihan terhadap konsumen.<sup>9</sup> Ibnu Abd al-Barr menekankan bahwa individu tidak seharusnya menetapkan harga secara mandiri atau menimbun barang ketika memiliki kelebihan harta. Dalam hal ini, sultan atau pemerintah diberikan diskresi untuk menetapkan harga berdasarkan ijtihad para ulama, dengan syarat tidak melakukan tindakan yang zalim.<sup>10</sup>

Habib bin Thahir juga menyatakan bahwa imam dapat menetapkan harga berdasarkan pertimbangan dari segi *mashlahah al-'ammah* atau kemaslahatan umum, yang menimbang kepentingan penjual maupun pembeli.<sup>11</sup>

Menariknya, pandangan mazhab Maliki ini hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, misalnya harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok yang lain. Artinya, tidak berlaku untuk komoditas barang lain yang bukan kategori bahan pokok. Perspektif yang digunakan dalam mazhab Maliki cenderung melihat adanya keterlibatan pemerintah ataupun badan dan lembaga yang berwenang untuk bertindak membuat kebijakan hukum ketika terjadi kondisi harga barang pokok yang tidak wajar.<sup>12</sup>

Keterlibatan pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok, hal ini dipandang krusial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Intervensi pemerintah ini didasari oleh beberapa alasan utama. Pertama, untuk

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

<sup>10</sup> Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2009), hlm. 147.

<sup>11</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 13-26.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

melindungi konsumen dari potensi eksploitasi harga oleh pedagang. Kedua, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan meredam gejolak harga dan inflasi. Ketiga, untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Keempat, untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui cadangan pangan yang memadai dan peningkatan produktivitas petani.<sup>13</sup>

Pembatasan harga ini dibatasi penerapannya pada kebutuhan pokok saja. Oleh sebab itu, mazhab Maliki tidak memperbolehkan pembatasan harga untuk komoditas selain kebutuhan pokok. Pandangan ini didasarkan pada perspektif bahwa pemerintah atau badan yang berwenang memiliki peran penting dalam mengatur harga barang pokok ketika terjadi kondisi yang tidak wajar. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari eksploitasi harga yang tinggi.<sup>14</sup>

Mazhab Maliki memandang intervensi pemerintah dalam mengatur harga barang pokok sebagai kewenangan (*tas'ir al-jabari*) demi kemaslahatan rakyat (*maslahah*). Intervensi ini didasarkan pada ijtihad untuk menemukan solusi atas harga tidak wajar. Bentuk intervensi seperti penetapan harga maksimum, subsidi, dan pengawasan pasar dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika harga barang pokok melonjak drastis dan membahayakan rakyat, dan tidak ada solusi lain yang lebih efektif.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para ulama tidak padu dalam menetapkan hukum *tas'ir* atau pembatasan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat mazhab Maliki tampak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama mazhab. Dalam ekonomi Islam, siapapun diperbolehkan berbisnis selama tidak melakukan penindasan atau kezaliman terhadap orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 89-90.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", ..... hlm. 13-26.

Salah satu bentuk *tas'ir al-jabari* yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pupuk subsidi. Subsidi pupuk telah dilaksanakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Subsidi ini diberikan dalam bentuk Harga Eceran Tertinggi (HET). Penetapan HET mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 mengenai Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, produsen, distributor, dan pengecer diwajibkan menjual pupuk bersubsidi dengan memperhatikan HET yang ditetapkan pemerintah. Pengecer juga diwajibkan menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan harga tidak lebih tinggi dari HET yang ditetapkan.

Realisasi pupuk subsidi dapat membantu petani meningkatkan hasil panen para petani, sehingga meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan. Menurunkan biaya produksi sehingga harga pupuk subsidi lebih murah daripada pupuk non-subsidi, dengan adanya penekanan biaya ini maka petani dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan akses pupuk, pupuk subsidi tersedia di kios-kios resmi dengan harga yang terjangkau, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.

Di Kecamatan Darussalam, terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk subsidi, di antaranya ketidaksesuaian data petani di BPP yang tidak selalu akurat dan terbaru, sehingga pupuk subsidi tidak selalu tepat sasaran dan penyelewengan pupuk subsidi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari hasil observasi awal diketahui bahwa terdapat tiga kios pengecer pupuk di Kecamatan Darussalam. Pemilik kios mendapatkan pemasukan pupuk dari PI (Pupuk Indonesia) yang kemudian disalurkan kepada petani. Kios-kios ini menjual dengan harga eceran tertinggi, yaitu antara Rp120.000,00-125.000,00

Untuk saat ini yang diberikan subsidi hanya pupuk urea dan NPK (Nitrogen, Phosphat dan Kalium). Namun pupuk NPK masih terhitung sedikit untuk tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan dari pihak BPP, petani yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai anggota penerima pupuk subsidi harus berasal dari kelompok tani yang berada di gampong itu sendiri. Pertama, pihak BPP akan mendaftarkan nama calon penerima pupuk subsidi di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), jadi masyarakat sebagai penerima pupuk subsidi harus dipastikan namanya terdaftar di SIMLUHTAN. Kedua, calon penerima pupuk subsidi harus didaftarkan ke e-alokasi. Pihak Kementerian Pertanian akan memverifikasi data penerima pupuk subsidi terkait siapa saja yang berhak mendapatkannya. Di saat ada data calon penerima yang tidak sesuai dengan data pada sistem dukcapil, maka akan ditolak sebagai penerima pupuk subsidi. Namun jika nama masyarakat itu sudah terdaftar di SIMLUHTAN dan dukcapil, maka sah menjadi penerima pupuk subsidi. Selanjutnya penyaluran pupuk subsidi akan disalurkan melalui kios-kios.<sup>17</sup>

Di Kecamatan Darussalam terdapat tiga kios pengecer pupuk subsidi. Masing-masing kios dapat menampung sebanyak tujuh sampai delapan gampong. Pada tahun sebelumnya, para petani hanya dapat menebus pupuk dengan cara mendaftarkan diri pada aplikasi yang bekerjasama dengan Bank Syaria'ah Indonesia (BSI). Setelah terdaftar di sistem BSI, para petani diberikan PIN oleh pihak bank. Para petani harus menyebutkan nama PIN yang diberikan oleh pihak bank pada saat melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi di kios-kios yang telah ditentukan. Jika ada petani yang tidak mendapatkan PIN dari pihak bank, maka para petani pada saat itu tidak dapat membeli pupuk subsidi. Namun untuk tahun 2024 sudah diperbolehkan kembali membelinya dengan cara membawa KTP. Dengan syarat

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Sabariah, pihak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam, Pada Tanggal 2 Mei 2024 di Lamreh, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

harus sudah terdaftar namanya di SIMLUHTAN sebagai anggota kelompok tani di gampongnya.<sup>18</sup>

Kemudian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam untuk mengawasi tepat atau tidaknya sasaran pemberian pupuk subsidi kepada petani, pihak BPP menugaskan penyuluh pertanian di setiap gampong yang ada di Kecamatan Darussalam untuk berkoordinasi dengan BPP jika terdapat keluhan dari para petani. Dari penjelasan narasumber di BPP dijelaskan bahwa untuk sementara ini belum ada penyimpangan penerima pupuk subsidi. Namun ada keluhan dari petani yang tidak terdaftar di SIMLUHTAN karena ada data yang tidak sinkron sehingga petani tidak dapat membeli pupuk bersubsidi.<sup>19</sup>

Berbeda halnya dari penjelasan narasumber BPP, penulis mewawancarai salah satu kios yang menjual pupuk bersubsidi. Diketahui bahwa harga jual pupuk subsidi adalah Rp120.000,00 sampai dengan Rp130.000,00. Pada kenyataannya juga terdapat penyimpangan lainnya, seperti terdapat petani yang bisa membeli pupuk subsidi dari dua gampong yang berbeda. Pada data alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024, terdapat data petani yang sudah meninggal dunia namun masih mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan terdapat data penerima yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.<sup>20</sup>

Ketidaksesuaian pembagian pupuk subsidi di masyarakat masih menjadi permasalahan yang kompleks di kalangan para petani, karena pada prakteknya banyak terdapat penyelewengan pupuk subsidi seperti dijual di atas harga eceran tertinggi serta ketidaksesuaian data pada BPP sehingga pupuk subsidi yang disalurkan tidak selalu tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh BPP terutama dalam mengatasi data penerima pupuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pemilik Kios Pengedar Pupuk Subsidi di Kecamatan Darussalam, Pada Tanggal 4 Mei 2024, Pukul 10.40 WIB.

subsidi yang tidak sesuai dengan realitasnya. Maka penelitian ini penting untuk dikaji dengan judul “**Kesesuaian *Database* Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Darussalam Dengan Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi Untuk Petani pra sejahtera Menurut *Tas’ir Al-Jabari*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian yang penulis teliti, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembagian pupuk subsidi oleh BPP Kecamatan Darussalam bagi petani pra sejahtera?
2. Bagaimana realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana tinjauan konsep *tas’ir al-jabari* terhadap realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembagian pupuk subsidi oleh BPP Kecamatan Darussalam bagi petani pra sejahtera.
2. Untuk mengetahui realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *tas’ir al-jabari* terhadap realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh BPP Kecamatan Darussalam.

## D. Penjelasan Istilah

Istilah yang penulis jelaskan dari judul untuk menegaskan definisi operasional variabel yang terdapat dalam rangkaian judul ini yaitu “Kesesuaian *Database* Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Darussalam Dengan Realisasi Pembagian Pupuk Subsidi Untuk Petani pra sejahtera Menurut *Tas'ir Al-Jabari*”.

### 1. Database

Database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Dalam konteks teknologi informasi, database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga memudahkan pengolahan dan akses informasi.<sup>21</sup>

Database yang penulis maksud pada penelitian ini adalah database BPP Kecamatan Darussalam yang menyimpan data akurat dan terkini tentang petani pra sejahtera, termasuk luas lahan dan kebutuhan pupuk. Informasi ini mendukung penentuan kriteria distribusi subsidi yang adil dan transparan.

### 2. Realisasi

Realisasi adalah proses atau hasil dari melakukan sesuatu atau mewujudkan sesuatu dalam kehidupan nyata. Realisasi bisa merujuk pada pencapaian, implementasi, atau manifestasi dari suatu konsep, rencana, atau ide.<sup>22</sup>

Realisasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketepatan data yang diberikan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dengan jumlah petani yang mendapatkan pupuk subsidi di Kecamatan Darussalam.

### 3. Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawa unsur yang diperlukan oleh tanaman.<sup>23</sup> Sedangkan

---

<sup>21</sup> Widodo, A. W., & Kurnianingtyas, D. *Sistem Basis Data*. (Brawijaya: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 12.

<sup>22</sup> Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 436.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pupuk> diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024.

subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu.<sup>24</sup> Adapun pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.<sup>25</sup>

Pupuk subsidi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pupuk urea dan NPK yang telah disubsidikan dan diperuntukkan bagi para petani dalam wilayah Kecamatan Darussalam. Pupuk subsidi ini dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Biasanya pupuk subsidi ini memiliki warna yang berbeda dengan pupuk yang dijual dengan harga non subsidi.

#### 4. Petani pra sejahtera

Petani pra sejahtera adalah petani yang berada dalam posisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibandingkan petani lainnya. Biasanya petani pra sejahtera memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas, kurang modal, serta akses yang terbatas terhadap teknologi, pelatihan, dan pasar. Akibatnya mereka seringkali kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.<sup>26</sup>

Petani pra sejahtera yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usaha pertanian di kawasan wilayah Kecamatan Darussalam. Petani pra sejahtera di kecamatan Darussalam biasanya ditandai dengan petani yang memiliki lahan terbatas serta modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan petani sejahtera.

#### 5. *Tas'ir Al-Jabari*

*Tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang berlaku secara aktual di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan dalam transaksi jual

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/subsidi> diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024.

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 1 Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tani> diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024.

beli ke masyarakat. Ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan dan menetapkan harga yang logis dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan para konsumen.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini *tas'ir al-jabari* akan digunakan sebagai landasan teori dalam mengkaji kesesuaian realisasi pembagian pupuk subsidi bagi penerima yang berprofesi sebagai petani berdasarkan kesesuaian data pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari seluruh langkah-langkah metode penelitian. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, untuk menghubungkan antara penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Lia Marlia pada tahun 2017, mahasiswi jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro berjudul *Distribusi Pupuk Bersubsidi di dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Ekonomi Islam*.<sup>28</sup> Pada penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mendistribusi pupuk bersubsidi yang memiliki pengaruh cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Hal ini dikarenakan dengan adanya

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..... hlm. 139.

<sup>28</sup> Lia Marlia, "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

pupuk bersubsidi, harga yang diperoleh menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Dalam penelitian ini menegaskan kembali bahwa masih terdapat permasalahan yang kompleks dalam pendistribusian pupuk bersubsidi diantaranya kelangkaan pupuk di kelompok tani dan harga pupuk bersubsidi masih mahal karena tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya para pengecer pupuk subsidi menjual pupuk tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendistribusian pupuk bersubsidi ini telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan tolong menolong.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya tertelak pada objek yang diteliti yaitu pupuk subsidi. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan. Penelitian tersebut hanya mengkaji dalam perspektif hukum Islam yang masih umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang lebih khusus yaitu konsep *tas'ir al-jabari*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rizki Inayatul Khasanah pada tahun 2018, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*.<sup>29</sup> Pada penelitian ini penulis membahas tentang tujuan pendistribusian pupuk subsidi. Penulis menyebutkan terdapat dua tujuan, yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung; dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung bertentangan

---

<sup>29</sup> Rizki Inayatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)". *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu membahas tentang distribusi pupuk subsidi. Namun perbedaannya, penelitian tersebut lebih memfokuskan pada tujuan dari pendistribusian pupuk subsidi, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan pada pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera (studi kasus pada salah satu kios pengecer pupuk subsidi di kecamatan Darussalam) dan kesesuaian realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera berdasarkan *database* pada Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Adhityawan Nugroho pada tahun 2011, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Negeri Semarang berjudul *Pengawasan Peredaran Pupuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blorayang*.<sup>30</sup> Adhityawan Nugroho membahas tentang peredaran pupuk di Kabupaten Blora yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap kecamatan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan secara berkala dengan cara pengawasan ditingkat peredaran melalui pemeriksaan sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, petani atau masyarakat pengguna pupuk. Tugas dari pengawas pupuk

---

<sup>30</sup> Adhityawan Nugroho, "Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora". *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011).

adalah melakukan pengawasan ditingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, peredaran dan pelabelan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengawasan pupuk berdasarkan objek pengawasan dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Laporan yang harus dilakukan secara berkala setiap bulannya adalah laporan penyediaan dan harga pupuk. Sedangkan laporan yang bersifat sewaktu-waktu adalah laporan terjadinya kasus atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu pupuk. Namun perbedaannya, pada penelitian tersebut membahas tentang pengawasan peredaran pupuk, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan pada proses pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera dan kesesuaian realisasi pembagian pupuk subsidi berdasarkan *database* pada Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Suwardi pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Terbuka Berau berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*.<sup>31</sup> Suwardi membahas tentang evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat dari tercapainya target pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip yang tepat yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Secara umum indikator keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan distribusi

---

<sup>31</sup> Suwardi, "Evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau". *Skripsi*. (Berau: Universitas Terbuka Berau, 2017).

pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masih perlu penyempurnaan, sehingga kebijakan subsidi pupuk ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pupuk subsidi. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih memfokuskan pada evaluasi pada pelaksanaan distribusi pupuk, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan pada realisasi pembagian pupuk subsidi dan kesesuaian *database* yang terdapat pada sistem Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah pada tahun 2018, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berjudul *Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*.<sup>32</sup> Aris Rahmaddillah membahas tentang tinjauan *tas'ir al-jabari* terhadap kenaikan harga tiket pada loket Terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (*mark up*) yang tidak ada persetujuan dari Organisasi Angkutan Darat dan Kementerian Perhubungan, sehingga pihak Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan (*tas'ir al-jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organisasi Angkutan Darat dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (*mark up*) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organisasi Angkutan Darat

---

<sup>32</sup> Aris Rahmaddillah, "*Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*". *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*tas'ir al-jabari*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah menggunakan konsep *tas'ir al-jabari*. Namun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan. Objek penelitian yang diteliti oleh Aris Rahmadillah adalah tiket bus yang dijual di Terminal Batoh Banda Aceh, sedangkan objek penelitian yang penulis fokuskan pada penelitian ini yaitu pupuk subsidi.

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka ini, penulis menegaskan bahwa karya ini berbeda dengan riset yang hampir serupa dengan yang penulis lakukan dan tidak ada plagiasi serta duplikasi pada riset ini. Substansi kajian pada penelitian ini adalah murni dari pemikiran dan analisis penulis, sehingga tidak terdapat duplikasi dan plagiasi dengan karya ilmiah sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian, diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga dapat menimbulkan hipotesis awal, penelitian dapat diolah dan dianalisis agar menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>33</sup> Dengan metode penelitian, peneliti dapat menetapkan prosedur pengumpulan data, cara menginterpretasikan dan langkah-langkah menganalisis data sebagai prosedur ilmiah untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Agar tercapainya suatu penelitian yang tepat dengan data yang valid, maka harus menerapkan beberapa prosedur penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu prosedur dalam menggunakan konsep dan langkah-langkah yang mencakup asumsi peneliti sampai pada

---

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.1.

metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologis normatif*. Pendekatan *sosiologis normatif* merupakan suatu metode yang berfokus pada norma sosial, nilai, dan aturan yang memandu perilaku dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis menekankan pada analisis data penerima pupuk subsidi, mekanisme distribusi, dan dampak sosial. Verifikasi data, evaluasi distribusi, dan analisis dampak sosial diperlukan untuk memastikan keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas. Pendekatan normatif berlandaskan konsep *tas'ir al-jabari* yang mendorong peran aktif petani dan transparansi pengelolaan pupuk subsidi. Prinsip keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan transparansi harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

Pada konteks distribusi pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Darussalam, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap norma dalam proses distribusi. Data yang akurat dan sesuai dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah kunci untuk memastikan bahwa pupuk subsidi diterima oleh petani yang berhak.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan,

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

mendeskripsikan dan menjelaskan fakta tentang objek riset secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>35</sup>

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dalam bentuk deskriptif dengan menunjukkan pemecahan dari permasalahan aktual dengan menyusun, menganalisis dan menafsirkan semua data yang berkaitan dengan tulisan ini. Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini, penulis langsung melakukan observasi ke tempat penelitian dengan menjumpai pegawai BPP untuk memperoleh beberapa informasi terkait dengan permasalahan penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan topik penelitian, sering kali melalui wawancara terstruktur dengan pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diselidiki.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui informasi dari responden, yang membutuhkan proses analisis terhadap data dan dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada data primer dilakukan melalui wawancara dan data dokumentasi sebagai bentuk dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu penjual pupuk, pegawai Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam, dan petani yang

---

<sup>35</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

<sup>36</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

mengetahui langsung tentang realisasi pemberian pupuk subsidi di Kecamatan Darussalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai data kepustakaan lainnya.<sup>37</sup> Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan dan berhubungan dengan konsep *ta'sir al-jabari* serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang realisasi kebijakan pemberian subsidi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini berbentuk proses tanya jawab antara *interviewer* dengan narasumber untuk meminta informasi atau argumen tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang sistematis, yaitu wawancara dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk mewawancarai para pihak yang terlibat pada suatu masalah dan diatur secara terstruktur.<sup>38</sup>

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan deretan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada

---

<sup>37</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

<sup>38</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UIIPress, 2005), hlm. 27.

narasumber sebagai alur yang harus diikuti.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penjual pupuk, pegawai Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam, dan petani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, tetapi melalui penggunaan dokumen untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen ini berupa catatan tertulis, foto, atau informasi lainnya yang merupakan hasil dari variabel yang telah diamati atau diteliti sebelumnya.<sup>40</sup>

Data dokumentasi yang penulis gunakan berupa data petani pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Darussalam dan data pada kios penjual pupuk untuk melihat kesesuaian data terhadap fakta yang terjadi di kalangan petani penerima pupuk subsidi.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>41</sup> Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data dan ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu metode untuk memecahkan masalah dengan memberikan deskripsi yang sesuai dengan realitas yang diamati dari

---

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

<sup>40</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, ... hlm. 136.

<sup>41</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

objek penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Fokus deskripsi pada penelitian ini yaitu tentang realisasi pembagian pupuk subsidi bagi penerima yang berprofesi sebagai petani berdasarkan kesesuaian data pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pada pedoman penulisan ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019,<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan karya ilmiah ini terbagi atas empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan istilah-istilah yang relevan. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengulas secara komprehensif tentang konsep *tas'ir al-jabari* dalam pemberian subsidi pupuk untuk petani pra sejahtera yang terdiri dari pengertian *tas'ir al-jabari* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang konsep *tas'ir al-jabari*, serta urgensi dan manfaat *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar. Serta menjelaskan secara komprehensif tentang ketentuan pembagian

---

<sup>42</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, ... hlm. 41.

pupuk subsidi dalam peraturan menteri pertanian, pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, dan upaya pemerintah dalam pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera.

Bab tiga, menjelaskan secara mendalam tentang ketentuan pembagian pupuk subsidi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam bagi petani pra sejahtera, realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam, dan tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* terhadap realisasi pembagian pupuk subsidi bagi petani pra sejahtera oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Darussalam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

